



Pendidikan Berbasis Standar

KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL 2019

**Dialog Pendidikan Antara BSNP,
Balitbang, dan TASS:
Tantangan Mutu Pendidikan Nasional**

DAFTAR ISI

- 3 PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR**

- 8 KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL 2019; PERLUASAN UNBK DAN PERLAKUKAN KHUSUS BAGI DAERAH TERDAMPAK GEMPA**

- 12 DIALOG PENDIDIKAN ANTARA BSNP, BALITBANG, DAN TASS: TANTANGAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL**

- 15 DISKUSI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERBASIS HAM DAN PERSPEKTIF GENDER**

- 17 UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

- 19 BSNP, KEMDIKBUD, DAN KEMENANG MENYEPAKATI RANCANGAN STANDAR SMK/MAK**

- 22 LENSAS BSNP**

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman. Tidak terasa, kita sudah di penghujung tahun 2018. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pembaca setia Buletin BSNP, kali ini kami sajikan kado istimewa. Mulai edisi ini, kami sajikan tulisan tentang Pendidikan Berbasis Standar secara berseri. Tulisan ini merupakan hasil kerja tim ahli BSNP pada tahun 2018. Kado kedua adalah kebijakan Ujian Nasional tahun 2019. Secara umum, kebijakan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan UN tahun 2018. Perbedaan pada jadwal pelaksanaan UN dan jumlah peserta. Kado lainnya adalah dialog seputar standar nasional pendidikan yang dilakukn BSNP bersama TASS dan Komnas Nasional Anti Kekeraman Terhadap Perempuan. Seperti biasa, edisi kali ini juga dilengkapi dengan lensa BSNP dalam bentuk foto-foto kegiatan. Selamat membaca.

Gambar Sampul: *Depan dari kiri ke kanan Djemari Mardapi Ketua tim evaluasi Standar Penilaian, Khomsiyah Anggota BSNP, Inayatullah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bambang Suryadi Ketua BSNP, dan Zainal A. Hasibuan Anggota BSNP berfoto bersama dengan tim ahli, pakar, dan peserta kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Bekasi, tanggal 26-28 Oktober 2018.*

Buletin BSNP
Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan

Penanggungjawab
Bambang Suryadi

Pemimpin Redaksi
Kiki Yulianti

Redaksi Eksekutif
Zainal A. Hasibuan
Nanang Arif Guntoro
Zaki Su'ud
Khomsiyah

Redaksi Pelaksana
Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor
Titi Savitri Prihatiningsih
Ipung Yuwono
Djoko Luknanto

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Ibar Warsita

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih
Nurul Najmah

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Email: info@bsnp-indonesia.org
Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Pendidikan Berbasis Standar

Bagian Pertama

Tim BSNP ¹

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada tahun 2018 menyusun buku Pendidikan Berbasis Standar: Kerangka dan Penerapannya di Indonesia. Proses penyusunan buku ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan November 2018. Tim yang terlibat adalah anggota BSNP dan tim ahli dari berbagai perguruan tinggi. Buku Pendidikan Berbasis Standar ini terdiri atas enam bab, yaitu Pendahuluan, Falsafah dan Arah Pendidikan Nasional, Pendidikan Berbasis Standar, Implikasi Pendidikan Berbasis Standar, Prospek Masa Depan Pendidikan Nasional Berbasis Standar, dan Penutup. Pada masing-masing bab, ada beberapa sub-bab yang diuraikan secara jelas. Mengingat pokok-pokok pemikiran dalam buku tersebut sangat penting dan perlu diketahui publik, maka Buletin BSNP mulai edisi empat 2018, menuangkannya dalam bentuk artikel secara berseri. Selamat membaca.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dibentuk dengan tujuan yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pasal 31 ayat 3 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD 1945 ini secara implisit menyatakan bahwa penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia secara eksplisit memulai pendidikan

berbasis standar dengan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (SPN). Dalam pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Dua tahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (SNP) yang mengamanatkan 8 Standar Nasional Pendidikan. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹ Anggota BSNP dan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pendidikan.

Fungsi Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Penetapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Ada beberapa alasan mengapa buku “Pendidikan Berbasis Standar” ini penting ditulis. Alasan *pertama*, standar adalah tuntutan sistem global. Standar diperlukan untuk kepentingan pengakuan dan kesetaraan, dan untuk merespon perubahan tatanan global. Arus mobilisasi warganegara Indonesia ke mancanegara, baik untuk mengikuti pendidikan, keperluan pekerjaan, ataupun menjadi individu yang berperan global lainnya hanya mungkin terjadi apabila ada pengakuan kesetaraan atas kompetensi warganegara Indonesia di kancah global.

Pengakuan dunia atas kesetaraan hasil sistem pendidikan nasional secara berkala dinilai dan dipantau oleh berbagai pihak eksternal, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) melalui *Program for International Student Assessment* (PISA) atau *the International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) melalui *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). PISA, TIMSS, dan PIRLS merupakan program penilaian tingkat dunia yang secara implisit menunjukkan bahwa sistem pendidikan global menganut standar sistem pendidikan berbasis standar. PISA adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga-tahunan, bertujuan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah berusia 15 tahun. Tujuan dari studi PISA adalah untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, dengan maksud untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil-hasilnya.

Sementara itu, TIMSS adalah rangkaian penilaian internasional tentang pengetahuan matematika dan sains dari para pelajar kelas IV dan VIII di berbagai belahan dunia. Pelajar-pelajar yang ikut



Bambang Soedibyo Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009 (berdiri) nara sumber diskusi "Pendidikan Berbasis Standar: Reflektif dan Prospektif" menyampaikan materi tentang pendidikan berbasis standar, di Jakarta (14/5/2018). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar.

serta berasal dari kumpulan sistem pendidikan yang beragam dalam hal pembangunan ekonomi, lokasi geografis, dan banyak penduduk. Dalam setiap sistem pendidikan yang ikut serta, setidaknya 4.500 sampai 5.000 pelajar dinilai.

PIRLS adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar (kelas IV) yang penyelenggaraannya dikoordinasi oleh IEA yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda). PIRLS diselenggarakan setiap lima tahun, yaitu pada tahun 2001, 2006, 2011, dan seterusnya. Indonesia mulai berpartisipasi pada PIRLS tahun 2006 yang diikuti oleh 45 negara atau negara bagian berpartisipasi sebagai peserta.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai sistem penilaian pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi pendidikan dan ekonomi dunia bermanfaat sebagai salah satu cara mengevaluasi diri tentang hasil dari sistem pendidikan nasional

yang diselenggarakan. Penilaian pendidikan ini menjadi indikator tentang kapasitas siswa Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Kompetensi siswa Indonesia harus setara agar dapat diakui untuk berkiprah di sistem global. Kapasitas siswa hanya dapat dicapai dengan baik melalui sistem pendidikan yang berlandaskan pada standar pendidikan yang efektif untuk mencapai kompetensi siswa yang diharapkan. Standar pendidikan menjadi dasar dalam perancangan kurikulum dan proses pendidikan, penyiapan sarana prasarana, pembiayaan, dan tentunya penyiapan guru dengan kompetensi yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai harapan.

Secara individual, siswa-siswi Indonesia telah banyak menunjukkan prestasi akademik secara internasional dalam bidang inovasi, sains, robotik, riset, dan karya ilmiah lainnya. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah mem-

berikan hasil yang diakui dunia. Namun prestasi tersebut bersifat individual dan belum mewakili prestasi siswa secara nasional. Oleh karena itu hasil ini masih harus ditingkatkan agar lebih massal dan ajeg dari waktu ke waktu.

Alasan *kedua*, kompleksitas sistem pendidikan nasional memerlukan manajemen sistem yang efektif. Standar diperlukan sebagai panduan para pelaku dalam sistem pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, terutama karena sistem pendidikan bersifat dinamis, dalam lingkungan yang sangat beragam. Pendidikan merupakan proses pengembangan bakat dan watak manusia agar menjadi manusia berakhlak mulia, berpengetahuan dan terampil. Sistem pendidikan Indonesia harus tetap menghormati, mempertimbangkan, sekaligus menjaga keberagaman dan kekhasan watak, karakter, potensi, dan bakat individu-individu yang terlibat dalam sistem pendidikan ini.

Standar tentang guru, sarana prasarana, dan pengelolaan misalnya, diperlukan agar proses pendidikan mencapai tujuan pembentukan manusia yang paripurna dan hasilnya cukup konsisten di seluruh Indonesia. Penetapan delapan standar nasional pendidikan ditujukan untuk menjadi acuan bagi pengelola pendidikan untuk menjamin keberhasilan tugas pendidikan yang mulia.

Dalam praktiknya, satuan pendidikan dan elemen-elemen dalam sistem pendidikan dapat menyesuaikan strategi, program maupun targetnya dalam menerapkan standar pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing. Karena alasan itulah, standar nasional pendidikan merupakan standar minimal. Jadi penetapan standar bukan untuk mengekang kepala sekolah, guru, dan praktisi pendidikan, sebaliknya, ia memberi peluang kepada satuan pendidikan untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Alasan Ketiga adalah penetapan standar pendidikan juga sebagai salah satu perangkat jaminan mutu pendidikan dan *compatibility* berbagai jalur

Penetapan standar bukan untuk mengekang kepala sekolah, guru, dan praktisi pendidikan, sebaliknya, ia memberi peluang kepada satuan pendidikan untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, satuan pendidikan memastikan bahwa lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik pada jalur yang sama maupun berbeda jalur pendidikan. Misalnya, seorang lulusan SMP, berdasarkan standar nasional pendidikan, harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan syarat bagi kesertaannya di jenjang SMA, SMK di jalur pendidikan formal maupun Program Paket C di jalur pendidikan nonformal.

Sebagai salah satu acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, standar menjadi ukuran atau kriteria yang sama bagi berbagai elemen pelaksana dan penyelenggara pendidikan, terutama dalam pemantauan, pengawasan, dan jaminan mutu hasil pendidikan, misalnya

melalui akreditasi.

SNP menjadi dasar pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan. Penilaian mutu untuk kepentingan akreditasi harus mengacu pada SNP. SNP dan akreditasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi mata uang. Akreditasi menjadi acuan masyarakat lokal dan dunia untuk menilai mutu lembaga pendidikan. Sistem akreditasi nasional harus mengacu dan mempertimbangkan sistem-sistem akreditasi internasional agar hasilnya diakui dunia. Artinya, baik standar pendidikan maupun akreditasi sama-sama harus mempertimbangkan standar-standar pendidikan dan sistem akreditasi yang berlaku di negara lain.

Budi Widiarko dalam *Euforia Perguruan Tinggi Disruptif* (Kompas, 2018) mengingatkan, orientasi berlebihan pada akreditasi, pemeringkatan, dan produktivitas ilmiah telah menjauhkan universitas dari jati dirinya sebagai rumah belajar. Kampus dan dunia pendidikan tinggi semakin didominasi oleh sosok para peneliti yang lebih mengutamakan publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi dan kemampuan meraup dana penelitian dari berbagai sumber. Akibatnya, pengajaran sering harus dikorbankan.

Kriteria dan ketentuan yang tertuang pada standar pendidikan tinggi adalah kriteria minimal. Hal ini bermakna bahwa standar pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi bangsa Indonesia. Kondisi dan situasi yang sangat beragam di Indonesia menuntut satu acuan yang sama untuk memastikan komparabilitasnya. Hal ini juga bermakna lebih luas bahwa standar nasional pendidikan adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Makna ini lah yang menjadi alasan kelima urgensi standar nasional pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.

Alasan *keempat*, standar nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Demikian juga dengan model pendidikannya. Selain sekolah, Indonesia memiliki madrasah dan pesantren

yang sistem dan kurikulum pendidikannya sangat beragam. Pendidikan berbasis standar yang dikelola oleh BSNP dapat memersatukan keragaman itu karena dijadikan acuan bersama penyelenggara pendidikan, negeri maupun swasta, di Indonesia. Sekolah dan madrasah berusaha memenuhi standar minimal pendidikan nasional, agar dapat diterima secara nasional bahkan global. Misal, lulusan sekolah dan madrasah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, dapat diterima atau dapat bersaing dengan lulusan sekolah dan madrasah di Jawa. Demikian pula sebaliknya.

Alasan terakhir atau kelima, gagasan tentang pendidikan berbasis standar sangat diperlukan dan dinantikan oleh para pemangku kepentingan sebagai acuan dan panduan dalam menerapkan sistem pendidikan berbasis standar. Namun demikian, gagasan tersebut belum dituangkan dalam sebuah buku secara sistematis dan terstruktur. Sementara kebutuhan publik terhadap gagasan tersebut semakin meningkat, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan keputusan.

Seiring dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, buku ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. *Pertama*, mendokumentasikan sejarah dan kebijakan PBS sebagai informasi bagi masyarakat dan pemerintah. Buku ini berisi tinjauan masa lalu, masa kini, masa depan pendidikan berbasis standar di Indonesia. Buku ini sebagai acuan tentang PBS sehingga ada persamaan pemahaman pemangku kepentingan tentang apa itu PBS. *Kedua*, mengevaluasi kebijakan standar nasional pendidikan. Dalam perjalanannya, PBS memerlukan reaktualisasi sesuai dengan tuntutan zaman seperti jumlah 8 (delapan) standar, struktur dan sumber daya pengelola, tugas dan fungsi BSNP, dan pembiayaan. *Ketiga*, bahan pertimbangan pengambilan kebijakan standar nasional pendidikan oleh pemerintah. PBS bukan saja penting bagi Indonesia tetapi lebih penting lagi bagaimana PBS ke depan harus lebih baik sehingga pendidikan lebih baik dan lebih berdaya saing. ●(Bersambung)

KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL 2019

Perluasan UNBK dan Perlakuan Khusus Bagi daerah Terdampak Gempa

Pemerintah akan menyelenggarakan Ujian Nasional pada bulan Maret sampai Mei 2019. Kebijakan UN tahun 2019, secara makro, tidak jauh berbeda dengan kebijakan UN tahun 2018. Perubahan pada aspek tanggal pelaksanaan dan peserta UN. Untuk mengulas lebih lanjut kebijakan UN 2019, tim Buletin BSNP melakukan wawancara dengan Ketua BSNP. Berikut ini laporan wawancara yang disampaikan dengan cara bertutur.

Apa kebijakan Ujian Nasional 2019?

Secara makro, kebijakan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan UN tahun 2018. Acuan pelaksanaannya masih tetap Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Perbedaan pada jadwal pelaksanaan, peserta dan beberapa hal teknis lainnya. Kebijakan teknis tersebut dituangkan dalam POS Penyelenggaraan Ujian Nasional yang ditetapkan oleh BSNP. Oleh karena itu, POS UN ditetapkan setiap tahun. Selain menetapkan POS UN, BSNP juga menetapkan kisi-kisi UN 2019 sebagai acuan dalam penyusunan soal.

Apa persiapan yang dilakukan BSNP

BSNP melakukan koordinasi dengan mitra, khususnya Balitbang dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Demikian juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP. Pada tanggal 8-11 Oktober, misalnya BSNP bersama Puspendik melakukan evaluasi Ujian Nasional

Berbasis Komputer (UNBK) 2018 dan persiapan UNBK 2019. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Balitbang, Direktorat terkait dan Kemendikbud pada tanggal 17 dan 23 Oktober 2018.

Apa hasil koordinasi tersebut?

Ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi, diantaranya penetapan jadwal UN, perluasan moda UNBK dengan prinsip berbagi sumber (*resource sharing*), dan pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa, seperti di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Kapan UN 2019 dilaksanakan?

UN dilaksanakan pada akhir bulan Maret sampai dengan pertengahan bulan Mei 2019. Termasuk UN Utama dan UN Susulan. Secara detailnya, UN SMK dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27, dan 28 Maret 2019. UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. UN Susulan SMK dan SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 April 2019. UN SMP/MTs dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2019, sedangkan UN Susulan pada tanggal 29 dan 30 April 2019. UN Paket C/Ula dilaksanakan pada tanggal 12-16 April 2019. UN Paket B dilaksanakan pada tanggal 10-13 Mei 2019. UN Susulan Paket C/Ulya dilaksanakan pada tanggal 26-30 April 2019. UN Susulan Paket B/Wustha dilaksanakan tanggal 17-21 Mei 2019.

Penjadwalan UN ini sengaja dibuat berbeda untuk masing-masing jenjang, dimulai dari SMK, kemudian SMA/MA, SMP/MTs, Paket C/Ulya dan Paket B/Wustha. Harapannya, dengan waktu yang



Rapat koordinasi evaluasi dan persiapan pelaksanaan UN dan USBN di ruang Sidang BSNP Cipete. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Balitbang, Kepala Puspendik, dan perwakilan dari masing-masing direktorat terkait di Kemdikbud. Rapat dipimpin oleh Bambang Suryadi Ketua BSNP, pada hari Selasa, 30 Oktober 2018

berbeda ini, pelaksanaan UNBK dengan prinsip berbagi sumber dapat dioptimalkan.

Berarti ada UN pada bulan Ramadhan?

Ya, tidak bisa dihindari pelaksanaan UN pada bulan Ramadhan, khususnya untuk UN Susulan/Paket B/Wustha. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait pelaksanaan UN pada bulan Ramadhan. Pihak Kemenag bisa menerima hal ini. Tidak ada masalah.

Berapa peserta UN 2019?

Berdasarkan data dari Balitbang per tanggal 17 April 2018, jumlah peserta UN 2019 sebanyak 8.333.203 siswa. Rinciannya, peserta UN SMP/MTs sebanyak 4.443.828, peserta UN SMA/MA sebanyak 2.092.369, peserta UN SMK sebanyak 1.586.558,

peserta UN Paket C/Ulya sebanyak 143.835, dan peserta UN Paket B/Wustha sebanyak 66.613.

Peserta UN tahun 2019 mengalami kenaikan 3% dibanding peserta UN tahun 2018 sebanyak 8.105.181.

Apa moda pelaksanaan UN 2019?

UN tahun 2019 merupakan tahun kelima yang dilaksanakan dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Belajar dari pengalaman dan *success story* pelaksanaan UNBK saat ini, maka moda pelaksanaan UN 2019 adalah dengan UNBK. Jadi UNBK sudah menjadi *mainstreaming* dalam pelaksanaan UN masa depan.

Apakah ada target tertentu dalam pelaksanaan UNBK 2019?

Tentu ada target yang ditetapkan. Pada jenjang



Tokot Supratyitno Kepala Balitbang, memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Aplikasi UNBK 2018 dan Persiapan Pelaksanaan UNBK 2019, di Jakarta, 8-11 Oktober 2018.

SMP target UNBK adalah 85 persen, sedangkan pada jenjang MTs targetnya adalah 100 persen. Target pada jenjang SMA, MA, dan SMK juga 100 persen. Target Program Paket B dan Paket C juga 100 persen.

Mengapa Target UNBK SMP 85% dan MTs 100%? Ada perbedaan, padahal pada jenjang yang sama?

Penetapan target ini dilakukan oleh masing-masing direktorat terkait. Pada jenjang SMP yang berada di bawah pembinaan Kemendikbud, target tersebut ditetapkan oleh direktorat pembinaan SMP, yaitu 85%. Tentu penetapan target ini sudah mempertimbangkan kondisi di lapangan, diantaranya ketersediaan infrastruktur dan jumlah sekolah. Demikian juga, MTs yang di bawah pembinaan Kementerian Agama, berani menetapkan target 100 persen, sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan dengan adanya perbedaan target ini. Ingat, ini target. Dalam realisasinya nanti, bisa terjadi perubahan. Tapi, paling tidak dari awal, kita sudah memiliki perencanaan dan impian.

Bagaimana strategi yang yang dilakukan untuk mencapai target tersebut?

Untuk mencapai target tersebut, ada dua pola dalam pelaksanaan UNBK. Pertama, pola mandiri. Artinya, satuan pendidikan yang memiliki kelayakan infrastruktur melaksanakan UNBK di tempatnya sendiri dengan sumber daya yang ada. Kedua, pola berbagi sumber (*resource sharing*). Artinya, satuan pendidikan, misalnya SMP, yang belum memiliki infrastruktur dapat melakukan UNBK dengan menggunakan infrastruktur milik SMA, SMK, atau MA. Jadi penerapan berbagi sumber ini bisa dilakukan dengan lintas jenjang, lintas negeri dan swasta. Bahkan bisa juga menggunakan infrastruktur milik pemerintah daerah. Dengan pola seperti ini, kami optimis target tersebut bisa dicapai.

Bagaimana pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa, seperti Lombok dan Sulawesi Tengah?

Dalam rapat koordinasi antar BSNP, Kemendikbud, dan Kemenag, telah disepakati

moda pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa dapat dilakukan dengan moda Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Saat ini, masih dalam proses pendataan seberapa banyak satuan pendidikan yang akan melaksanakan UNKP.

Apa ada kebijakan lain bagi daerah terdampak gempa, selain dengan moda UNKP?

Tentu ada kebijakan lain. Sebab proses pembelajaran di daerah terdampak gempa tersebut belum bisa dilakukan secara normal. Masih dilakukan di tenda darurat atau semi permanen. Selain itu, kondisi psikologis siswa juga masih belum stabil. Situasi seperti ini pasti akan berdampak pada ketuntasan belajar dan capaian kurikulum. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan UN di daerah ini akan ditetapkan tersendiri. Tapi, sampai saat ini belum ditetapkan. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih perlu koordinasi dengan dinas pendidikan dan LPMP di daerah tersebut.

Bagaimana pelaksanaan UN bagi siswa berkebutuhan khusus?

Bagi siswa berkebutuhan ada kebijakan tersendiri. Pelaksanaan UN bagi pesereta didik SLB dan sekolah inklusi tetap dilaksanakan, namun tidak wajib (pilihan). Moda pelaksanaan UN dengan kertas. Akan dilakukan pendataan berapa jumlah peserta didik pada SLB dan sekolah inklusi yang akan mengikuti UN.

Apa pesan khusus untuk peserta UN 2019?

Pelaksanaan Ujian Nasional bukan hanya sebagai bentuk *tanggungjawab konstitusional*, tetapi juga *tanggungjawab moral*. Ujian atau evaluasi bagi anak didik adalah bagian dari pendidikan. Maka hindarkan dan cegah semua upaya yang mengarah pada ketidakjujuran, karena itu jelas akan mengingkari hakekat pendidikan.

Kepada para peserta UN, kami pesankan: utamakan kejujuran dan percaya diri. Nilai yang dicapai dengan kejujuran dan percaya diri, meskipun

Kepada para peserta UN, kami pesankan: utamakan kejujuran dan percaya diri. Nilai yang dicapai dengan kejujuran dan percaya diri, meskipun rendah, lebih terhormat daripada nilai yang dicapai dengan kecurangan, meskipun nilainya tinggi. Prestasi penting, jujur yang utama.

rendah, lebih terhormat daripada nilai yang dicapai dengan kecurangan, meskipun nilainya tinggi. Prestasi penting, jujur yang utama.

Bagaimana pemanfaatan hasil UN untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?

Pemanfaatan hasil UN untuk dijadikan bahan pertimbangan masuk ke pendidikan yang lebih tinggi merupakan amanat undang-undang. Bukan kebijakan BSNP. Oleh karena itu, jika ada sekolah atau perguruan tinggi yang tidak menggunakan hasil UN untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru, mereka yang harus menjelaskannya. ●

DIALOG PENDIDIKAN ANTARA BSNP, BALITBANG, DAN TASS: TANTANGAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL



Jenny Lewis *Capacity Review and Development Adviser*, TASS menyerahkan laporan akhir mengenai Tinjauan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia kepada Bambang Suryadi Ketua BSNP.

Isu tentang kualitas pembelajaran, guru, kepemimpinan sekolah, dan budaya akademik merupakan permasalahan yang dihadapi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks penjaminan mutu, diantara permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya komitmen, rendahnya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan data yang belum optimal, dan keterbatasan sosialisasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan *mindset*, perilaku, kerangka kerja, dan instrumen untuk memastikan standar nasional

pendidikan sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan diterapkan dengan berorientasi pada kepatuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*). Peralihan paradigma dari penjaminan mutu (*quality assurance*) ke peningkatan mutu (*quality improvement*) mutlak dilakukan.

Demikian catatan penting dari diskusi dan dialog tentang standar nasional pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan antara BSNP, Balitbang, dan *Technical Assistance for Education Systems Strengthening* (TASS), pada hari Selasa

(23/10/2018) di ruang sidang BSNP, Cipete Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara ini anggota BSNP, Totok Suprayitno Kepala Balitbang, Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pihak TASS, ada empat orang, yaitu Jenny Lewis, *Capacity Review and Development Adviser*, Joanne Dowling, *Facility Director*, Ingga Danta Vistara, *Facility Manager*, dan Rani Norhadhi.

Menurut Jenny Lewis, program TASS adalah mendukung Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan tinjauan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sehubungan dengan telah selesainya laporan akhir Tinjauan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tersebut, TASS melakukan audiensi dengan BSNP.

“Tujuan audiensi ini adalah untuk menyampaikan laporan dan mendiskusikan tentang implementasi standar nasional pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia”, ucap Jenny Lewis.

Di Indonesia, tambah Jenny Lewis, penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam sepuluh tahun terakhir, penyediaan dan akses ke pendidikan telah mencapai kemajuan, namun ada sejumlah tantangan yang diharapkan pemerintah Indonesia. Diantara tantangan tersebut adalah peningkatan mutu pembelajaran belum optimal, penerapan sistem penjaminan mutu yang masih rendah, serta kompetensi dan profesionalisme guru yang perlu ditingkatkan.

“Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan mutu penyediaan pendidikan dan mutu hasil pendidikan”, ucap Lewis.

Joanne Dowling, *Facility Director* mengatakan bahwa tujuan TASS melakukan tinjauan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional adalah untuk memetakan program penjaminan mutu dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional serta tindak lanjut yang harus dilakukan.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan mutu penyediaan pendidikan dan mutu hasil pendidikan

Jenny Lewis, *Capacity Review and Development Adviser*, TASS

Metode yang digunakan adalah metode survei di lima provinsi, yaitu Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Di masing-masing provinsi dipilih dua kabupaten/kota (satu pedesaan dan satu perkotaan). Kota yang dipilih meliputi Bengkulu, Salatiga, Samarinda, Mataram, dan Sorong, sedangkan lima kabupaten yang dipilih meliputi Bengkulu Utara, Kebumen, Kuta Barat, Lombok Tengah, dan Manokwari. Responden yang dipilih berjumlah 940 orang, 500 responden provinsi, 420 responden kabupaten/kota, dan 20 responden nasional (pusat). Mereka meliputi pengawas, kepala sekolah, anggota tim penjaminan mutu pendidikan, dan guru. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, responden melibatkan personil dinas pendidikan, fasilitator penjaminan mutu pendidikan, personil LPMP, dan anggota tim penjaminan mutu provinsi. Selain itu, di tingkat pusat, responden yang dipilih meliputi unsur-unsur Ditjen Dikdasmen, Puspendik, BAN S/M, BSNP, dan anggota satuan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam sambutannya mengatakan bahwa standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam konteks

penjaminan mutu ini, program TASS sangat relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

“Hasil revidu yang dilakukan TASS konsisten dengan laporan Bank Dunia (2018) yang menyatakan bahwa di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum terjadi pembelajaran yang berkualitas. Anak-anak, pada kenyataannya bersekolah, tetapi mereka tidak belajar. Inilah yang dalam laporan Bank Dunia disebut dengan *schooling without learning*”, ucap Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa permasalahan peningkatan mutu pendidikan nasional tidak hanya ditemukan di lapangan, yakni pada tingkat sekolah/madrasah, tetapi juga ada di pusat, yakni pada standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pada tahun ini BSNP bersama Balitbang dan Direktorat terkait di lingkungan Kemdikbud, melakukan revisi terhadap standar nasional pendidikan.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang berpandangan, selain rendahnya kualitas sumber daya manusia, salah satu faktor penting yang membuat mutu pendidikan kita masih rendah karena adanya kecenderungan untuk melakukan pendekatan regulasi dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan.

“Masalah birokrasi kita adalah kecenderungan menyelesaikan masalah dengan pendekatan regulasi. Setiap muncul masalah, diselesaikan dengan regulasi. Dampaknya, para pelaku pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai dengan pengawas, ketika muncul masalah, mereka lebih sibuk mendiskusikan dari segi regulasi, bukan pada solusinya”, ucap Totok.

Selain itu, Kepala Balitbang juga berharap supaya TASS dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengukur kinerja guru. Selain berdialog dengan BSNP dan Balitbang, TASS juga perlu berdialog dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merespon laporan tersebut, Zainal A. Hasibuan

anggota BSNP mengatakan penelitian ini sangat menarik, sebab kita menghadapi berbagai masalah dan berbagai upaya dilakukan, tapi belum berhasil.

“Kita memerlukan energi ekstra untuk menyelesaikan masalah pendidikan bangsa ini. Tidak mudah. Kebijakan yang berubah-ubah karena dipengaruhi oleh kebijakan politik. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan keputusan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mesti memahami hasil penelitian ini dan menindaklanjutinya”, ucap Ucok panggilan akrab anggota BSNP tersebut.

Zaki Su’ud anggota BSNP menyadari betul bahwa Indonesia masih mengalami berbagai masalah pendidikan. Diantaranya adalah masalah infrastruktur, kualitas guru, dan kualitas pembelajaran. Penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan transformasi pendidikan nasional. Namun, sejauh mana peran ini dilakukan, kita belum tahu persis. Oleh karena itu, problem yang ada perlu dipetakan dan peran tersebut didistribusikan, mulai dari pusat sampai ke daerah”, ucap Zaki.

Pada bagian akhir paparannya, Lewis atas nama TASS merekomendasikan kepada Kemendikbud untuk mengubah fokus penjaminan mutu pendidikan dari penjaminan mutu pendidikan menjadi peningkatan mutu sekolah dan penjaminan peningkatan mutu sekolah. Kemendikbud juga perlu mengembangkan kerangka kerja peningkatan mutu sekolah yang mengartikulasikan tujuan jangka pendek dan menengah serta visi untuk peningkatan mutu sekolah.

Selain itu, Kemendikbud perlu membangun kepemilikan dan komitmen terhadap peningkatan mutu sekolah dan penjaminan mutu sekolah di semua jenjang sistem pendidikan dengan memastikan bahwa personil pemerintah nasional dan daerah memberikan kontribusi terhadap pengembangan program peningkatan mutu sekolah nasional. ●

DISKUSI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERBASIS HAM DAN PERSPEKTIF GENDER



Suasana dialog seputar standar nasional pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender di ruang sidang BSNP, Selasa, 30 Oktober 2018. Dari kiri ke kanan, Tini S, Nahe'i Nahi, Nina Nurmila, Kiki Yuliati, Bambang Suryadi, dan Zaki Su'ud. Turut hadir dalam dialog, namun tidak nampak di dalam foto, Nur Qomariyah (Komnas Perempuan), Djoko Luknanto, Nanang Arif Guntoro, Khomsiyah, dan Teuku Ramli Zakaria.

BSNP sebagai badan independen yang memiliki kewenangan mengembangkan standar nasional pendidikan senantiasa terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan menjalin kerja sama dengan mitra kerja. Salah satu mitra yang datang ke BSNP adalah Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang melakukan dialog pada hari Selasa, 30 Oktober 2018. Ada empat orang dari KOMNAS Perempuan yang turut hadir dalam dialog ini, yaitu Nina Nurmila, Nahe'i Nahi, Tini S, dan Nur Qomariyah.

Menurut Nina, Komnas Perempuan memiliki mandat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu badan yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam menentukan arah pendidikan nasional adalah BSNP. Oleh karena itu, KOMNAS Perempuan, terpanggil untuk melakukan dialog seputar isu pendidikan nasional.

“Melalui dialog ini kami ingin memastikan

dalam standar nasional pendidikan ada rumusan yang menjadi acuan pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender”, ucap Nina anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan periode 2015-2019.

Lebih lanjut Nina berharap pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan buku teks pelajaran, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, instrument akreditasi juga perlu mengakomodasi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender.

“Berdasarkan hasil tinjauan dan telaah tim dari KOMNAS Perempuan, instrumen akreditasi sekolah/madrasah belum terlihat hanya keberpihakannya terhadap perempuan atau berbasis gender”, ujar Nina seraya menambahkan KOMNAS Perempuan telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI untuk melaksanakan pelatihan siswa SMA DKI Jakarta terkait pemenuhan hak-hak konstitusional bagi perempuan.

Nahe'i Nahi anggota KOMNAS Perempuan mengatakan bahwa untuk mempersambungkan upaya KOMNAS Perempuan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, telah dilakukan. KOMNAS Perempuan sudah melakukan banyak hal untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di antara dengan mengintegrasikan kurikulum berbasis gender dan pelatihan guru-guru di daerah.

Merespon pertanyaan tersebut, Bambang Surya di Ketua BSNP menjelaskan bahwa sebagai badan independen BSNP memiliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan dan memantau implementasi standar nasional pendidikan, menyelenggarakan Ujian Nasional, dan menilai kelayakan buku teks pelajaran. Kewenangan melaksanakan akreditasi, termasuk mengembangkan instrumen, adalah kewenangan BAN S/M dan BAN PAUD PNF.

“Untuk mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan melalui akreditasi, ada badan lain yang melakukannya, yaitu BAN S/M atau BAN PAUD-PNF. Jadi BSNP tidak mengembangkan instrumen akreditasi. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah instrumen akreditasi sudah mengakomodasi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender, KOMNAS Perempuan perlu melakukan dialog dengan BAN S/M atau BAN PAUD-PNF”, saran Bambang seraya menekankan bahwa rumusan dalam standar nasional pendidikan telah mengakomodasi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender.

Sementara itu Zaki Su'ud salah satu anggota BSNP menjelaskan bahwa standar dibuat secara global tetapi akar dari apa yang diharapkan oleh KOMNAS Perempuan sudah ada didalam standar, termasuk substansi keberpihakan terhadap perempuan atau berbasis gender.

Sebagai contoh, tambah Zaki Su'ud, dalam rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMK, ada tiga rumusan yang mengakomodasi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender. Tiga rumusan tersebut adalah: (1) menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan warga masyarakat global, (2) bekerjasama dalam

keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, gender, dan bahasa dengan menjunjung hak asasi dan martabat manusia, dan (3) memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja dalam kelompok secara santun, efektif, dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

“Rumusan ini sangat jelas dan secara eksplisit sudah mengakomodasi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender. Oleh karena itu Komnas Perempuan, perlu berkomunikasi dan bekerjasama dengan Puskurbuk yang menangani kurikulum dan perbukuan. Dengan demikian secara operasional hal-hal berbasis HAM dan gender dapat dituangkan didalam kurikulum”, ucap Zaki.

Kiki Yulianti, sekretaris BSNP menyampaikan bahwa di dalam pengembangan standar, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh adalah “*azas impartiality*”, yakni azas tidak berpihak kepada kelompok tertentu, termasuk kepada kelompok perempuan.

“Standar yang ada dan sedang dikembangkan sebetulnya sudah berbasis gender. Salah satu contohnya bisa dilihat pada standar sarana prasarana. Dalam standar ini, setiap satuan pendidikan harus memiliki jamban yang rasio penggunaannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jamban untuk perempuan, rasionya lebih kecil dibanding jamban untuk laki-laki, karena memang ada perbedaan biologi antara perempuan dan laki-laki”, ucap Kiki Yulianti.

Djoko Luknanto, anggota BSNP menyarankan agar Komnas Perempuan mencemati dimanakah intervensi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender itu bisa dimasukkan, apakah pada level peraturan, level standar atau level sekolah.

“Intervensi pendidikan berbasis HAM dan perspektif gender itu harus dikemas sesuai levelnya, mana yang untuk level peraturan, level standar ataupun level sekolah”, ujar Djoko.

Pertemuan ini merupakan dialog yang kedua kali. Dialog pertama dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018. Pada kesempatan tersebut Nina Nurmila menyerahkan Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Perspektif HAM dan Gender ke BSNP. ●

UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



Inayatullah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi memberikan kata sambutan pada acara pembukaan kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Bekasi tanggal 27 Oktober 2018.

BSNP menyelenggarakan uji publik rancangan standar nasional di Bekasi Jawa Barat dan Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2018. Ada satu rancangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan uji publik, yaitu SNP untuk kursus dan pelatihan. Selain melakukan uji publik, di tempat dan waktu yang sama BSNP juga mengumpulkan data untuk evaluasi implementasi Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam

sambutannya mengatakan bahwa salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan standar adalah uji publik. Pola uji publik standar nasional pendidikan pada tahun ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

“Jika pada tahun-tahun sebelumnya uji publik dilakukan dengan pola anggota BSNP dan tim ahli berkunjung ke daerah di berbagai provinsi untuk menemui responden, uji publik tahun ini dilakukan dengan pola mengundang responden dari daerah tertentu. Tahun ini, ada dua daerah yang dijadikan tempat uji publik, yaitu Bekasi Jawa Barat dan

Makassar Sulawesi Selatan”, ucapnya.

Perbedaan lainnya, tambah Bambang, adalah uji publik tahun ini selain mengundang responden, BSNP juga mengundang pakar sebagai nara sumber sebanyak delapan orang untuk masing-masing standar. Para pakar ini mewakili unsur akademisi, praktisi, pengambil kebijakan di dinas provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. Peran mereka adalah menelaah dan mengkritisi rancangan standar serta memberikan masukan untuk perbaikan standar tersebut.

Responden uji publik mewakili unsur guru, pengawas, kepala sekolah, praktisi, pengelola lembaga kursus dan pelatihan, asosiasi profesi, asesor akreditasi, dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya. Untuk masing-masing standar, BSNP mengundang 45 orang responden. Mereka mewakili daerah tertentu di Indonesia yang mewakili Indonesia Bagian Timur, Tengah, dan Barat.

“Keterwakilan daerah ini sangat penting dalam pengembangan standar maupun evaluasi implementasi standar. Sebab standar ini merupakan konsensus bersama dan mesti mengakomodasi keragaman serta kondisi di seluruh NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke”, ucap Bambang.

Sementara itu Inayatullah Sekretaris Dinas

Pendidikan Kota Bekasi dalam sambutannya mengatakan bahwa dipilihnya Kota Bekasi sebagai tempat uji publik standar nasional pendidikan perlu diapresiasi.

“Kami sangat berterimakasih, Kota Bekasi dijadikan tempat uji publik rancangan standar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh BSNP. Selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga sebagai refleksi bagi kami di Dinas Pendidikan Kota Bekasi”, ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Sebagai refleksi, tambahnya, kami menyadari bahwa pencapaian standar nasional pendidikan di Kota Bekasi belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Namun kami memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi melalui BOSDA.

“Pemda Kota Bekasi memberikan BOSDA sebesar 28.000 rupiah per siswa SDN per bulan, sedangkan untuk SD Swasta sebesar 10.000 rupiah. Bagi siswa SMPN, sebesar 90.000 rupiah dan SMP Swasta sebesar 15.000 rupiah per siswa per bulan”, ucap Inayatullah seraya berharap semoga pelaksanaan uji publik di Bekasi Jawa Barat berjalan dengan lancar. Demikian juga pelaksanaan uji publik di Sulawesi Selatan. Amin. ●

BSNP, KEMENDIKBUD, DAN KEMENAG MENYEPAKATI RANCANGAN STANDAR SMK/MAK



Eksresi kegembiraan. Peserta rapat berpose bersama se usai pembahasan dan harmonisasi rancangan standar nasional pendidikan untuk SMK/MAK di Biro Hukum dan Organisasi (2/1/2018). Dari Kiri ke kanan: Bambang Parikesit, Abdullah Faqih Kasubdit Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kemenag, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Bakrun Direktur Pembinaan SMK, Kiki Yuliati Sekretaris BSNP, Simul Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Suhartono Arham Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Ditjen Dikdasmen, dan Heru Adi Nugroho Kasubbag Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Kemdikbud.

Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) telah disepakati bersama oleh BSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Kesepakatan bersama ini dicapai dalam acara harmonisasi yang digelar di ruang sidang Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud pada hari Jumat (2/1/2018).

Turut hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari ketiga lembaga tersebut, diantaranya Bakrun Direktur Pembinaan SMK, Bambang Suryadi dan

Kiki Yuliati sebagai Ketua dan Sekretaris BSNP, Simul Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud, Abdullah Faqih Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, dan Suhartono Arham Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Ditjen Dikdasmen.

“Semula Ibu Dian Wahyuni Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang akan memimpin rapat ini, namun beliau mendadak dipanggil Bapak Menteri”, ucap Simul yang mendapat mandat untuk memimpin rapat pada siang hari itu.



Sejumlah siswa belajar praktik teknik mesin di SMK Negeri Binaan Sumatera Utara. (Foto: fototrenindonesia.com)

Melalui rapat koordinasi ini, tambah Simul, diharapkan akan dicapai kesepakatan bersama antara BSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama terhadap rancangan SNP untuk SMK/MAK yang sudah dikembangkan oleh BSNP.

Sementara itu, Bakrun Direktur Pembinaan SMK salam sambutannya mengatakan bahwa rancangan Permendikbud tentang SNP untuk SMK/MAK ini sudah lama ditunggu di lapangan.

“Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan perlu direspon melalui pengembangan standar yang menggambarkan kekhasan pendidikan SMK/MAK. Oleh karena itu, setelah dua tahun Inpres tersebut ditetapkan, SNP untuk SMK/MAK perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, ucap Bakrun.

Menyikapi urgensi SNP untuk SMK/MAK tersebut, Abdullah Faqih yang mewakili Kementerian Agama, mendukung Rancangan Peraturan

Mendikbud tentang SNP SMK/MAK tersebut.

“Pada prinsipnya Kementerian Agama menerima dan mengikuti rancangan SNP SMK/MAK yang dikembangkan BSNP bersama Direktorat Pembinaan SMK”, ucap Abdullah Faqih mengutip pernyataan Direktur Pendidikan Madrasah yang disampaikan melalui pesan singkat.

Tahun ini, tambah Faqih, Kemenag telah meresmikan dua MAK Negeri, yaitu MAK N Ende Nusa Tenggara Timur dan MAK N Bolaanga Mongondow Sulawesi Utara. Pada tahun mendatang akan dibuka MAK N di tempat lain yang rintisannya telah dilakukan pada tahun 2017 di Seram Maluku Utara, Samarinda Kalimantan Timur, Bintuhan Bengkulu, dan Rokan Hulu Riau.

Terkait dengan istilah MAK di lingkungan Kemenag yang oleh sebagian pihak diartikan MA Keagamaan, MA Kejuruan dan MA Keterampilan, Faqih menegaskan bahwa di Kemenag ada MA Keterampilan, tetapi tidak ada MA Keagamaan.

“Di Kemenag hanya ada dua model kejuruan,

yaitu MA Kejuruan dan MA Keterampilan. MA Keterampilan itu esensinya, ya Madrasah Aliyah biasa, tetapi para siswanya tinggal di asrama dan dibekali dengan keterampilan khusus, sehingga bisa dikatakan MA Plus Kejuruan. Ijazah yang mereka terima juga ijazah madrasah aliyah”, ucap Faqih seraya menambahkan MA Keterampilan ada di beberapa daerah, diantaranya Jember Jawa Timur dan Kulon Progo DIY.

BSNP menyambut positif sikap Kementerian Agama yang menyetujui rancangan SNP untuk SMK/MAK tersebut. SNP yang dikembangkan mencakup delapan standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

“Kami menyambut baik persetujuan yang disampaikan pihak Kemenag. Rancangan SNP untuk SMK/MAK ini dalam proses pengembangannya telah melibatkan para pakar dari akademisi, praktisi di dunia usaha dan dunia industri, asosiasi profesi, kepala sekolah dan guru kejuruan. Jika semua pihak sudah sepakat, maka secara substansi rancangan Permendikbud ini bisa segera ditetapkan”, ucap Bambang.

Kesepakatan ini, kata Ketua BSNP, memiliki arti yang sangat luar biasa. Sebab kesepakatan ini dicapai pada hari Jumat yang penuh berkah, sehingga perlu diabadikan dalam sesi foto bersama sebagai catatan sejarah dalam sistem pendidikan nasional kita.

Kekhasan SNP SMK/MAK

Pada kesempatan tersebut, Ketua BSNP menyampaikan secara singkat kronologis pengembangan SNP SMA/MAK dan kekhasan SNP untuk SMK/MAK.

“Selama sepuluh tahun, sejak 2006-2010, SNP yang diterapkan untuk SMK/MAK sama dengan SNP untuk SMA/MA. Padahal SMK/MAK memiliki keunikan yang sangat berbeda dengan SMA/MA. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, BSNP bersama Direktorat SMK melakukan revisi standar SMK/MAK”, ucap Bambang.

Menurut Bambang revisi yang sangat mendasar dan fundamental adalah pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Rumusan kompetensi yang selama ini dilakukan secara terpisah antara rumusan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekarang dibuat rumusan yang integratif. Maksudnya, dalam satu rumusan SKL mencakup tiga dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan bobot yang berbeda. Ada rumusan yang dimensi pengetahuan lebih dominan dari keterampilan atau sikap, demikian juga sebaliknya.

Perubahan lainnya adalah ditetapkannya area kompetensi yang mencakup sembilan area, yaitu (1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) kebangsaan dan cinta tanah air, (3) karakter pribadi dan sosial, (4) kesehatan jasmani dan rohani, (5) literasi, (6) kreativitas, (7) estetika, (8) kemampuan teknis, dan (9) kewirausahaan. Area kompetensi nomor satu sampai dengan tujuh yang ada di dalam SNP SMK/MAK ini sama dengan area kompetensi untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA. Dua area terakhir, yaitu kemampuan teknis dan kewirausahaan yang menjadi ciri khas SMK/MAK. Selain itu, rumusan SKL juga menunjukkan adanya gradasi pada SMK/MAK program tiga tahun dan empat tahun.

Sebagai contoh, pada area kewirausahaan ada tiga rumusan kompetensi, salah satunya adalah “memiliki keinginan kuat dan kemampuan mengelola usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu”.

“Dengan adanya rumusan SKL ini, satuan pendidikan dituntut untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik yang mendorong tercapainya kompetensi tersebut. Oleh karena itu, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, mutlak dilakukan oleh SMK/MAK”, ucap Bambang.

Dengan ditetapkannya SNP untuk SMK/MAK, maka akan ada implikasi terhadap kurikulum, buku teks pelajaran, kerja sama antara SMK/MAK dan DUDI, pola rekrutmen dan pengembangan guru, pelaksanaan akreditasi, dan uji kompetensi keahlian. ●(BS)

LENSA



Anggota BSNP, Tim Ahli dan Pakar Standar Kursus dan Pelatihan berfoto bersama setelah kegiatan FGD tentang rancangan Standar Nasional Pendidikan untuk Kursus dan Pelatihan di Bekasi, tanggal 27 Oktober 2018.



Anggota BSNP, Tim Ahli dan para pakar berfoto bersama setelah kegiatan FGD hasil penelaahan Standar Nasional Pendidikan di Makassar tanggal 27 Oktober 2018.

B S N P



Rapat koordinasi persiapan Ujian Nasional 2019 di Balitbang Kemdikbud, tanggal 17 Oktober 2018, dengan agenda jadwal UN, perluasan UNBK, dan pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa. Rapat dipimpin oleh Totok Suprayitno Kepala Balitbang. Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi (kedua dari kanan), perwakilan dari Kementerian Agama, BSNP, Puspendik, dan Direktorat terkait.



Anggota BSNP, Kepala dan Sekretaris Balitbang Kemendikbud berfoto bersama perwakilan dari *Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS)* setelah mendengarkan laporan akhir dari TASS tentang Tinjauan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia, tanggal 23 Oktober 2018.

LENSA



Rapat pleno BSNP dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud membahas tentang Evaluasi Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran Secara *Online/Daring* dan Penetapan Hasil Penilaian Buku Teks Pelajaran tanggal 16 Oktober 2018.



Tim Ahli Standar Kursus dan Pelatihan serta responden Uji Publik membahas rancangan Standar Nasional Pendidikan untuk Kursus dan Pelatihan pada kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Makassar, tanggal 27 Oktober 2018

BSNP



Teuku Ramli Zakaria Anggota BSNP dan Junus Simangunsong tim ahli, memberikan arahan kepada responden kegiatan evaluasi implementasi Standar Penilaian Pendidikan di Makassar, tanggal 27 Oktober 2018.



Gunarti Dwi Lestari Tim Ahli PAUD memberikan arahan kepada responden kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Implementasi Standar PAUD di Makassar, tanggal 27 Oktober 2018.

LENSA



Pembukaan kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Bekasi tanggal 27 Oktober 2018. Acara dibuka secara resmi oleh Inayatullah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi.



Depan dari kiri ke kanan Zainal A. Hasibuan Anggota BSNP, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Inayatullah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Khomsiyah Anggota BSNP, dan Djemari Mardapi Ketua Tim Evaluasi Standar Penilaian, dalam acara pembukaan kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Bekasi, tanggal 26-28 Oktober 2018.

BSNP



Rapat Pembahasan USBN di Ruang sidang BSNP. Turut hadir dalam acara ini Kepala dan Sekretaris Balitbang Kepala Puspendik dan perwakilan dari Direktorat terkait di Kemeng. Rapat dipimpin oleh Bambang Suryadi Ketua BSNP pada Selasa tanggal 22 November 2018.



Tim Ahli Standar Penilaian dan pakar membahas instrumen Standar Penilaian pada kegiatan Uji Publik dan Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Bekasi, tanggal 27 Oktober 2018



<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



9 770126 460552